

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan. Salah satunya adalah sistem pengelolaan keuangan daerah yang dulunya terpusat, yaitu penggunaan anggaran dimonitoring langsung oleh pemerintah pusat. Sekarang kewenangan pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) (Mahsun et al., 2016:81). Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, APBD memiliki peran penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

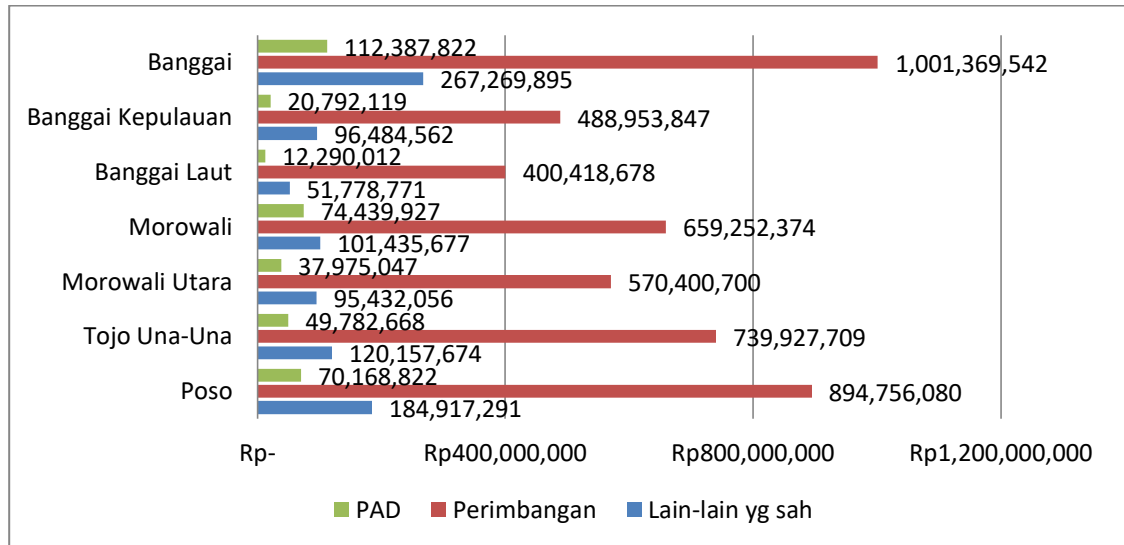
Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari

suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan (Febliin & Yuliawati, 2020). Pemilihan indikator dan ukuran kinerja harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini agar pengukuran kinerja yang dilakukan dapat digunakan sebagai dasar melakukan perubahan, penghapusan dan perbaikan (Mahsun et al., 2016:146). Analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio keuangan yang dihasilkan dapat menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangan (Haryanto, 2020).

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai seberapa berhasil misi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik tercapai serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

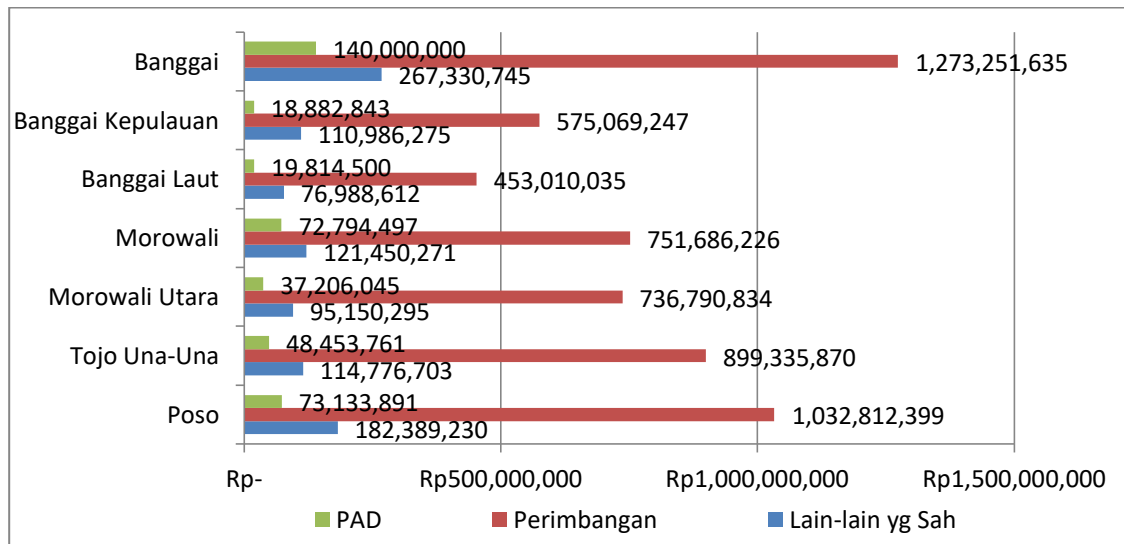
Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran kondisi keuangan daerah yang dapat diukur dengan cara tertentu. Salah satunya dapat berupa perkembangan realisasi pendapatan daerah yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan instansi pemerintah dalam mengelola keuangan. Pendapatan

Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



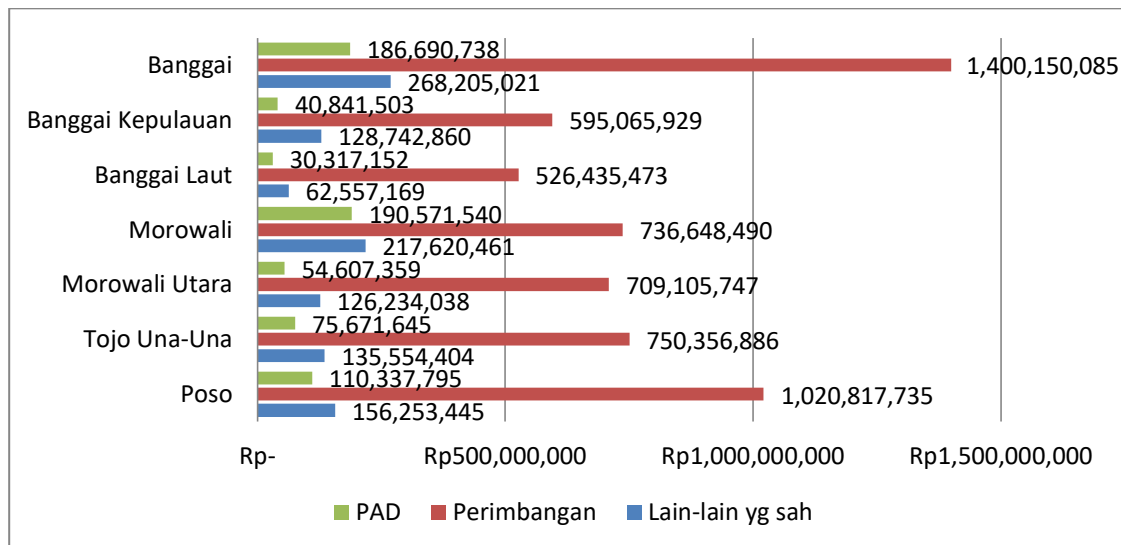
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah (2015)

**Gambar 1.1: Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2015 (dalam ribu Rupiah)**



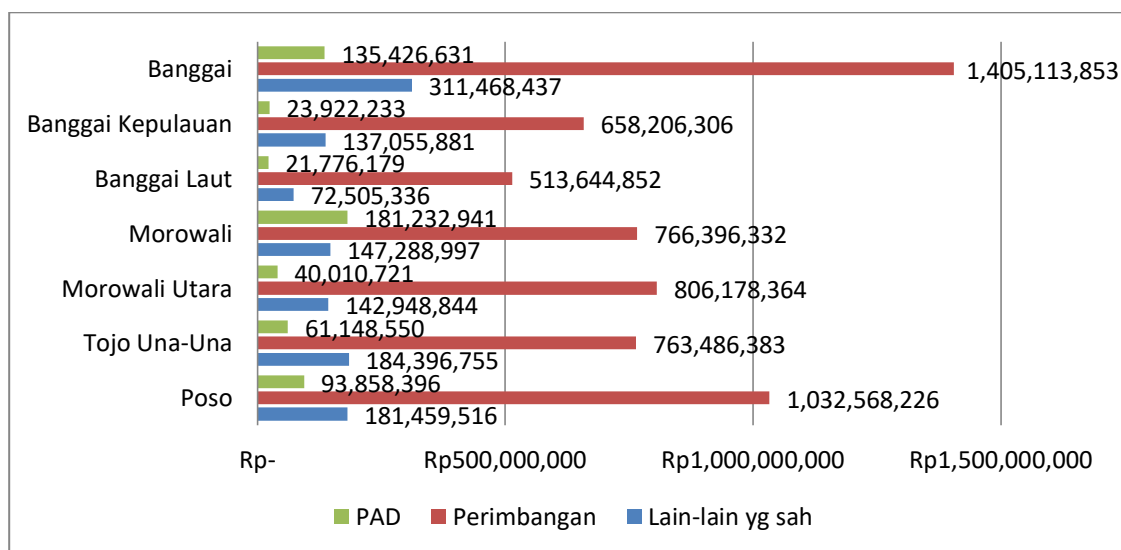
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah (2016)

**Gambar 1.2: Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2016 (dalam ribu Rupiah)**



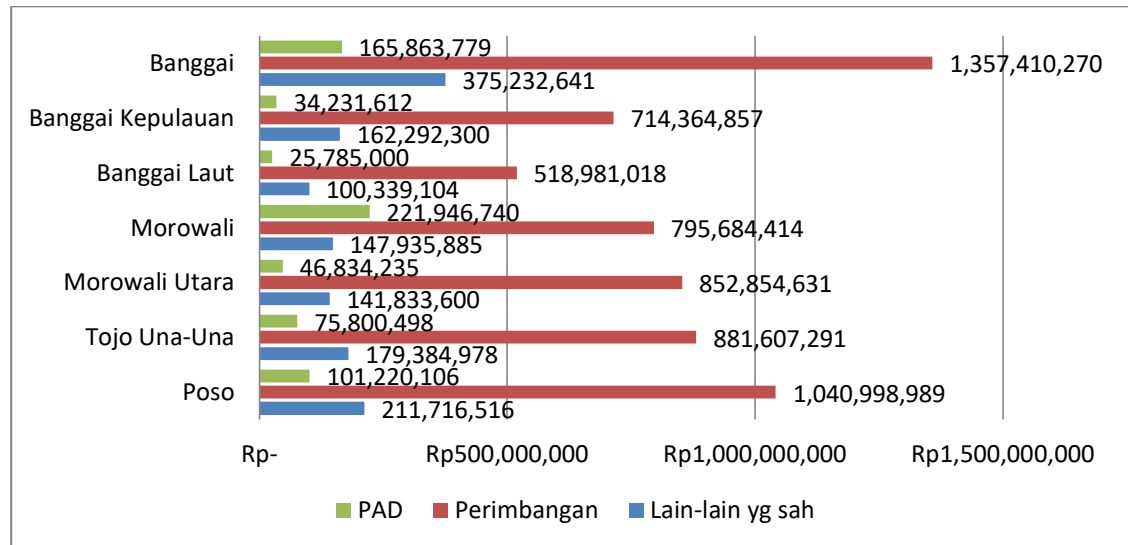
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah (2017)

**Gambar 1.3: Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2017 (dalam ribu Rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah (2018)

**Gambar 1.4: Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2018 (dalam ribu Rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah (2019)

**Gambar 1.5: Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2019 (dalam ribu Rupiah)**

Berdasarkan grafik realisasi pendapatan daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) tahun anggaran 2015-2019 untuk PAD Kabupaten Banggai pada tahun 2018 mengalami penurunan, PAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2018, Kabupaten Banggai Laut juga mengalami penurunan PAD pada tahun 2018, sedangkan untuk Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tojo Una-Una juga mengalami ketidakstabilan penerimaan PAD penurunannya terjadi pada tahun 2016 dan 2018 dan untuk Kabupaten Poso pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Dana Perimbangan Kabupaten Banggai mengalami kenaikan selama 4 tahun namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, Dana Perimbangan Kabupaten Banggai Kepulauan konsisten mengalami peningkatan selama periode 2015-2019,

Dana Perimbangan Kabupaten Banggai Laut mengalami penurunan pada tahun 2018, sedangkan untuk Dana Perimbangan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso juga turut mengalami penurunan pada tahun 2017.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan konsisten mengalami peningkatan selama periode 2015-2019, untuk Kabupaten Banggai Laut mengalami penurunan pada tahun 2017, sedangkan untuk Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso mengalami ketidakstabilan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah selama periode 2015-2019. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) mengalami ketidakstabilan. Untuk itu, dengan dilakukannya analisis rasio keuangan ini sehingga dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di provinsi Sulawesi Tengah Bagian Timur.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan diantaranya, penelitian Rahmayati (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah

Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ngangi et al., (2018) menunjukkan bahwa Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang dilihat dari Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan, dikatakan baik dan efisien. Sedangkan jika dilihat dari Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian dan Rasio Keserasian Belanja Modal masih sangat kurang. Disebabkan karena pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dan juga penggalan potensi serta pengelolaan sumber daya alam masih sangat kurang dan disertai dengan porsi belanja daerah yang sebagian dananya dialokasikan untuk belanja modal yang dinilai kurang serasi.

Dari uraian di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2015-2019**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan realisasi pendapatan daerah pemerintah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah Bagian Timur baik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2015-2019. Untuk PAD, tidak ada satu pun yang pemerintah kabupaten/kota yang konsisten mengalami peningkatan pada periode ini. Sedangkan untuk realisasi penerimaan daerah yang meningkat stabil selama periode ini hanya terjadi pada Dana Perimbangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan juga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berangkat dari identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2015-2019?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Timur) Tahun Anggaran 2015-2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Teoritis**

Secara teoritik penelitian ini berguna untuk ilmu akuntansi terutama akuntansi keuangan daerah dan memberikan pengetahuan dalam menganalisis kinerja keuangan khususnya analisis keuangan pemerintah daerah.



## 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan pemerintah daerah untuk melihat kinerja keuangan daerahnya, apakah meningkat atau sebaliknya sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah Bagian Timur.